



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI ARGUNAINI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 80369

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 4.000 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10.000 m²/218 m² di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 112 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/140 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/FORTUNER VRZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 159.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.356.650.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.336.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.